

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A, Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Amanat, Anisitus, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darus, Luthfan Hadi, 2016, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- E. Algra, Nikolaas, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, Arsyad, 2010, *Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris bagi Penduduk di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktik Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Naja, Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Perangin, Effendy, 2006, *Hukum Waris*, Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat, Fakultas Hukum UI, Jakarta.

- Pitlo, A, 2006, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta.
- Purwaka, I Gede, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Rahmad, Oesman Ali, 2012, *Perbedaan Surat Keterangan Hak Waris dan Akta Keterangan Hak Waris*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ramulyo, HM Idris, 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Satrio, J, 1998, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sidharta, Syamsul, 2010, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suhardjono, 2015, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan 123.
- Sumarningsih, F. Eka, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris, (Diktat Kuliah Program Studi Notariat*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata, cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyanto, Achiel 2007, *Kemahiran Hukum Acara Perdata*, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S, Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan 3*, Erlangga, Jakarta.

2. Tesis

Amalina Lalitya, “Surat Keterangan Waris Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Dan Camat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Dyah Retno Dewati, “Akibat Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Asli Yang Tidak Dikuatkan Oleh Lurah Dan Camat Di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Yulina Citra, 2021, “Tinjauan Hukum Pluralisme Kewenangan Pembuatan dan Bentuk Surat Keterangan Waris Berdasarkan Perbedaan antara Warga Negara Indonesia Penduduk Asli dan Warga Negara Indonesia Keturunan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tetang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 953).

4. Internet

Irma Devita, “Keterangan Waris”, <https://irmadevita.com/2012/keterangan-waris>, (diakses tanggal 18 Mei 2022).